

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/e2vkpa70>

TATA KELOLA DESA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA SUGIH WARAS BARAT

Bandung Bondowoso¹, Bastiar Tambuh², Syahri³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang¹⁻³

email korespondensi: syahri99@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 menuntut pemerintah desa untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan kolaboratif dalam menanggulangi penyebaran virus di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat Kabupaten Muara Enim, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, perangkat desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan COVID-19 telah dilaksanakan melalui perencanaan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat, koordinasi kelembagaan, implementasi program kesehatan, serta pengawasan kebijakan. Partisipasi masyarakat dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama keberhasilan penanggulangan pandemi. Namun, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemerintahan desa dan peningkatan kolaborasi kelembagaan dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: tata kelola pemerintahan desa, COVID-19, kebijakan publik, partisipasi masyarakat, governance.

1. PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjadi salah satu krisis kesehatan global yang berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sistem pemerintahan. Pemerintah di berbagai tingkat administrasi dituntut untuk memiliki kapasitas tata kelola yang responsif, adaptif, dan kolaboratif dalam menghadapi situasi krisis kesehatan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, desa memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat dalam

melaksanakan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintahan desa berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran virus (Kementerian Desa PDTT, 2020).

Desa Sugih Waras Barat Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu wilayah yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga memerlukan peran aktif pemerintah desa dalam mengendalikan penyebaran virus. Pemerintah desa berperan dalam pelaksanaan sosialisasi protokol kesehatan, pengelolaan bantuan sosial, pengawasan mobilitas masyarakat, serta koordinasi dengan instansi kesehatan. Namun, pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan pandemi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya pendukung kebijakan kesehatan (Widodo & Nugroho, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa memiliki peran penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Penelitian oleh Sari dan Wibowo (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian pandemi di tingkat desa dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan desa dan partisipasi masyarakat. Penelitian lain oleh Nugroho et al. (2021) menegaskan bahwa koordinasi antar kelembagaan menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19. Selain itu, penelitian Rahman dan Putra (2022) menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang berbasis partisipasi masyarakat mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan publik. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran pemerintah desa dalam penanggulangan pandemi, kajian yang secara khusus menyoroti tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif governance pada tingkat desa masih relatif terbatas, khususnya pada Desa Sugih Waras Barat Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan penyebaran COVID-19.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat Kabupaten Muara Enim, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam pengendalian pandemi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian governance desa serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam penanggulangan krisis kesehatan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk menganalisis tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat Kabupaten Muara Enim. Subjek penelitian meliputi kepala desa, perangkat desa, tenaga kesehatan desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima kebijakan penanggulangan COVID-19. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumentasi kebijakan desa.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Creswell & Creswell, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Validitas data diuji melalui triangulasi metode (Sugiyono, 2020). Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan member check (Lincoln & Guba, 1985). Metodologi ini digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian dalam menganalisis tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

3. TINJAUAN LITERATUR

Tata kelola desa merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, serta berbagai aktor lainnya dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Tata kelola desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup bagaimana keputusan dibuat, bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana masyarakat dilibatkan, serta bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih besar bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah desa mempunyai posisi strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, pelaksanaan kewenangan desa tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, serta mekanisme partisipasi dan pengawasan.

Literatur mengenai tata kelola desa di Indonesia menunjukkan bahwa praktik tata kelola sangat beragam antarwilayah. Aspinall, Berenschot, Savirani, dan Ruhyanto menemukan adanya variasi yang besar dalam pola pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, serta mekanisme akuntabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang relatif seragam tidak secara otomatis menghasilkan praktik tata kelola yang seragam di setiap desa.

Dengan demikian, tata kelola desa dalam penelitian ini dipahami sebagai proses pengelolaan pemerintahan dan sumber daya desa yang mencakup pengambilan keputusan, koordinasi, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan pemerintah desa merespons kebutuhan masyarakat.

Konsep good governance pada dasarnya menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip tersebut menjadi penting karena desa merupakan pemerintahan yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat.

Good village governance dapat dilihat melalui beberapa aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, responsivitas, serta pengawasan. Transparansi mengharuskan pemerintah desa menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat, terutama berkaitan dengan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Sementara itu, partisipasi menempatkan masyarakat sebagai pihak yang tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian mengenai good village governance di Indonesia menunjukkan bahwa internal control, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kelemahan pada aspek tersebut dapat menghambat efektivitas pengelolaan pemerintahan desa dan meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya desa.

Dalam konteks penanggulangan COVID-19, prinsip good governance menjadi semakin penting karena pemerintah desa harus mengambil keputusan dalam kondisi krisis, mengelola sumber daya yang

terbatas, menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, serta menyampaikan informasi mengenai risiko dan kebijakan pandemi kepada masyarakat.

Pandemi COVID-19 dapat dipahami sebagai situasi krisis yang membutuhkan respons pemerintahan yang cepat, adaptif, dan terkoordinasi. Pada tingkat desa, pemerintah tidak hanya berhadapan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga dengan dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat pembatasan aktivitas masyarakat.

Tata kelola dalam situasi krisis menuntut pemerintah desa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan, menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, membangun koordinasi, serta melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan perkembangan situasi. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan pandemi di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut direncanakan dan dilaksanakan.

Penelitian mengenai tata kelola lokal di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa desa memiliki peran penting dalam perlindungan kesehatan dan ekonomi masyarakat selama pandemi. Penelitian tersebut mengidentifikasi tiga aspek penting dalam keberhasilan tata kelola pandemi di tingkat desa, yaitu mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan perlindungan sosial-ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan karakter tata kelola yang adaptif karena pemerintah desa mampu menyesuaikan tindakan dengan kondisi krisis yang dihadapi masyarakat.

Temuan tersebut relevan untuk penelitian di Desa Sugih Waras Barat karena penanggulangan COVID-19 perlu dilihat sebagai proses tata kelola yang melibatkan berbagai dimensi, bukan semata-mata sebagai pelaksanaan program kesehatan.

Pandemi COVID-19 menempatkan pemerintah desa sebagai salah satu aktor penting dalam penanggulangan pandemi. Kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat membuat desa memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi, melakukan pencegahan, mendata kelompok rentan, mengoordinasikan bantuan, dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah di tingkat lokal.

Pada masa pandemi, pemerintah pusat mengarahkan adanya refocusing anggaran desa untuk mendukung penanganan COVID-19. Dana desa dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanggulangan pandemi, termasuk kegiatan pencegahan, penanganan, penyediaan sarana pendukung, serta bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian, penanggulangan COVID-19 di desa dapat dipahami melalui dua dimensi utama. Pertama, dimensi kesehatan, yang mencakup pencegahan penyebaran, penyampaian informasi kesehatan, penerapan protokol kesehatan, pendataan kasus, dan koordinasi dengan fasilitas atau tenaga kesehatan. Kedua, dimensi sosial-ekonomi, yang mencakup pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak, perlindungan kelompok rentan, serta upaya mempertahankan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Kedua dimensi tersebut perlu dikelola secara terpadu karena pandemi tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan, tetapi juga mengurangi aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan pandemi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan dan sumber daya.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam tata kelola desa. Pemerintah desa tidak dapat menjalankan kebijakan penanggulangan pandemi secara efektif tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Partisipasi dapat berbentuk keterlibatan dalam musyawarah, penyampaian informasi, pelaksanaan kegiatan pencegahan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah desa.

Musyawarah desa pada kondisi normal merupakan salah satu ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi kebijakan desa. Namun, pandemi dapat mengubah praktik musyawarah karena adanya pembatasan aktivitas dan meningkatnya kebutuhan pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat.

Penelitian Sobari mengenai tata kelola desa selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa musyawarah desa mengalami perubahan fungsi. Musyawarah yang sebelumnya menjadi ruang konsultasi dan negosiasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam beberapa kasus berubah menjadi forum untuk mengklarifikasi dan menyetujui kebijakan yang telah diarahkan oleh regulasi pemerintah di atasnya.

Temuan tersebut penting sebagai dasar analisis karena menunjukkan adanya kemungkinan ketegangan antara kebutuhan pemerintah untuk merespons krisis secara cepat dengan prinsip partisipasi masyarakat. Dalam penelitian di Desa Sugih Waras Barat, aspek tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan COVID-19.

Penanggulangan pandemi membutuhkan koordinasi karena pemerintah desa tidak bekerja secara sendiri. Pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan pemerintah kecamatan, puskesmas, BPD, perangkat desa, kader kesehatan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, serta masyarakat secara umum.

Koordinasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan, mempercepat penyampaian informasi, memastikan bantuan tepat sasaran, serta mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan sosial-ekonomi. Studi mengenai Desa Pujon Kidul menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan tata kelola pandemi di tingkat lokal.

Dalam konteks Desa Sugih Waras Barat, koordinasi dapat dianalisis melalui hubungan antara pemerintah desa dengan aktor-aktor yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Hal ini meliputi bagaimana informasi disampaikan, bagaimana pembagian tugas dilakukan, bagaimana keputusan dikoordinasikan, serta bagaimana permasalahan di lapangan diselesaikan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap penggunaan anggaran. Perubahan prioritas anggaran tersebut menjadikan transparansi dan akuntabilitas semakin penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sumber daya desa digunakan dalam situasi krisis.

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai program, penerima bantuan, serta penggunaan anggaran. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa atas keputusan dan tindakan yang dilakukan.

Studi mengenai respons desa terhadap dampak COVID-19 menunjukkan bahwa anggaran desa memainkan peran penting dalam penanggulangan pandemi, termasuk melalui realokasi anggaran untuk bantuan langsung tunai dan kegiatan penanganan COVID-19. Studi tersebut juga menunjukkan perlunya harmonisasi dan konsistensi kebijakan agar pemerintah desa tidak mengalami kesulitan dalam menerjemahkan perubahan kebijakan anggaran ke dalam praktik.

Oleh sebab itu, penelitian mengenai tata kelola Desa Sugih Waras Barat perlu memperhatikan bagaimana pemerintah desa mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19.

Tata kelola adaptif merupakan pendekatan yang relevan untuk menjelaskan pemerintahan dalam

kondisi yang penuh ketidakpastian. Pandemi COVID-19 memiliki karakter yang berubah-ubah sehingga kebijakan yang diterapkan pemerintah desa harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi kesehatan, sosial, ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.

Tata kelola adaptif menekankan kemampuan pemerintah dan aktor lokal untuk belajar dari kondisi yang berkembang, melakukan penyesuaian kebijakan, membangun kolaborasi, dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara fleksibel. Studi mengenai Desa Pujon Kidul menunjukkan bahwa mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan perlindungan sosial-ekonomi dapat menghasilkan respons lokal yang lebih adaptif dalam menghadapi pandemi.

Konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis apakah pemerintah Desa Sugih Waras Barat hanya menjalankan instruksi pemerintah secara administratif atau mampu melakukan adaptasi kebijakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan landasan bagi penelitian mengenai tata kelola desa dalam penanggulangan COVID-19. Penelitian Izana, Susanti, dan Afala mengenai Desa Pujon Kidul menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pandemi di tingkat lokal dipengaruhi oleh mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan perlindungan sosial-ekonomi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dan memperlihatkan pentingnya peran institusi desa dalam merespons krisis.

Penelitian Sobari mengenai tata kelola desa di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pandemi memengaruhi praktik musyawarah desa. Forum musyawarah mengalami pergeseran dari ruang konsultasi dan negosiasi menjadi forum yang lebih berfungsi untuk klarifikasi dan persetujuan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa situasi krisis dapat memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa.

Sementara itu, penelitian mengenai hubungan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menunjukkan bahwa kualitas pelayanan penanganan COVID-19 menjadi salah satu mekanisme yang menghubungkan tata kelola pemerintahan dengan kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting untuk membangun legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan pada masa pandemi.

Kajian World Bank mengenai village governance, politics, and participation di Indonesia juga menunjukkan bahwa tata kelola desa perlu dilihat tidak hanya dari aspek kelembagaan formal, tetapi juga dari dinamika politik lokal dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian tata kelola desa selama pandemi telah membahas berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya, perlindungan sosial-ekonomi, koordinasi, musyawarah, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, penelitian pada tingkat desa tertentu tetap penting dilakukan karena karakteristik tata kelola desa sangat kontekstual dan dapat berbeda antara satu desa dengan desa lainnya.

Berdasarkan kajian literatur, terdapat tiga celah penelitian yang dapat menjadi dasar penelitian mengenai Tata Kelola Desa dalam Penanggulangan COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat.

Pertama, sebagian penelitian terdahulu berfokus pada aspek tertentu dari penanggulangan pandemi, seperti pengelolaan Dana Desa, bantuan sosial, atau pelayanan kesehatan. Penelitian ini dapat mengintegrasikan berbagai aspek tersebut dalam perspektif tata kelola desa.

Kedua, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik tata kelola desa sangat beragam. Bahkan

desa yang berada dalam kerangka regulasi yang sama dapat menunjukkan kualitas partisipasi, koordinasi, akuntabilitas, dan responsivitas yang berbeda. Karena itu, studi pada Desa Sugih Waras Barat diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan penanggulangan COVID-19 benar-benar diterjemahkan dan dilaksanakan pada tingkat lokal.

Ketiga, pandemi menciptakan kondisi yang berbeda dari tata kelola desa dalam keadaan normal. Pemerintah desa harus mengambil keputusan secara cepat, sementara pada saat yang sama tetap dituntut untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Kondisi tersebut menciptakan persoalan penting mengenai bagaimana pemerintah desa menyeimbangkan efektivitas penanganan krisis dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana tata kelola Desa Sugih Waras Barat dalam penanggulangan COVID-19, termasuk proses pengambilan keputusan, koordinasi antaraktor, partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan pemerintah desa beradaptasi terhadap perubahan kondisi pandemi.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, tata kelola Desa Sugih Waras Barat dalam penanggulangan COVID-19 dapat dianalisis melalui beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Responsivitas pemerintah desa, yaitu kemampuan pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan masyarakat serta meresponsnya secara cepat dan tepat.
2. Partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan program penanggulangan COVID-19.
3. Koordinasi dan kolaborasi, yaitu hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, kader, serta masyarakat.
4. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi mengenai kebijakan, program, bantuan, dan penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19.
5. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya desa.
6. Mobilisasi sumber daya, yaitu kemampuan pemerintah desa memanfaatkan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, jaringan kelembagaan, dan dukungan masyarakat.
7. Perlindungan sosial-ekonomi, yaitu upaya pemerintah desa mengurangi dampak pandemi terhadap pendapatan, kebutuhan dasar, dan kelompok masyarakat yang rentan.
8. Adaptasi kebijakan, yaitu kemampuan pemerintah desa menyesuaikan kebijakan dan program berdasarkan perkembangan pandemi serta kebutuhan masyarakat.

Dengan menggunakan dimensi tersebut, penelitian dapat menggambarkan tata kelola Desa Sugih Waras Barat secara lebih komprehensif. Penelitian tidak hanya menilai apakah program penanggulangan COVID-19 dilaksanakan, tetapi juga bagaimana proses tata kelola tersebut berlangsung, siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana sumber daya dikelola, serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dan memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perencanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sugih Waras Barat telah melakukan perencanaan kebijakan dalam rangka penanggulangan COVID-19 melalui pembentukan satuan tugas desa dan penyusunan berbagai program yang diarahkan pada pencegahan penyebaran virus. Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan adalah sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Perencanaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menerjemahkan kebijakan pandemi ke dalam program yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa.

Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya mekanisme partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, musyawarah merupakan instrumen penting untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dan membangun legitimasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang direncanakan melalui proses partisipatif memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat karena masyarakat memperoleh ruang untuk memahami persoalan sekaligus menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya.

Temuan tersebut sejalan dengan Nugroho et al. (2021) yang menyatakan bahwa perencanaan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan pandemi. Partisipasi pada tahap perencanaan menjadi penting karena karakteristik masyarakat desa berbeda dengan masyarakat perkotaan. Kebijakan yang efektif membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kapasitas masyarakat setempat.

Dari perspektif tata kelola, proses tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara pemerintah desa dan aktor masyarakat dalam menghasilkan kebijakan. Dengan demikian, perencanaan penanggulangan COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat dapat dipahami sebagai bentuk *collaborative governance* pada tingkat lokal, meskipun tingkat dan bentuk kolaborasinya masih terbatas pada perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Namun demikian, keterlibatan perangkat desa dan tokoh masyarakat belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh kelompok masyarakat telah terwakili. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan kelompok rentan, seperti masyarakat lanjut usia, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, serta kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, kualitas perencanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum musyawarah, tetapi juga oleh sejauh mana forum tersebut mampu menghasilkan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

4.2. Koordinasi Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat berlangsung cukup efektif. Koordinasi melibatkan pemerintah desa, puskesmas, serta aparat keamanan. Masing-masing institusi memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pemerintah desa berperan dalam pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya desa, puskesmas berperan dalam aspek kesehatan, sedangkan aparat keamanan mendukung penerapan kebijakan dan ketertiban masyarakat.

Koordinasi tersebut dilakukan antara lain melalui monitoring kondisi kesehatan masyarakat dan

distribusi bantuan sosial. Pola tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan COVID-19 tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan kesehatan, tetapi membutuhkan integrasi antara aspek kesehatan, sosial, keamanan, dan pemerintahan.

Temuan ini sejalan dengan Rahman dan Putra (2022) yang menegaskan pentingnya kolaborasi kelembagaan dalam pengendalian pandemi. Dalam situasi krisis, koordinasi antarorganisasi menjadi penting karena setiap lembaga memiliki sumber daya, kewenangan, dan informasi yang berbeda. Pemerintah desa memiliki kedekatan dengan masyarakat dan mengetahui kondisi lokal, sedangkan puskesmas memiliki kompetensi teknis dalam bidang kesehatan. Aparat keamanan memiliki kapasitas dalam mendukung penerapan kebijakan di tingkat masyarakat.

Dari perspektif tata kelola, koordinasi tersebut menunjukkan adanya pembagian peran antaraktor. Efektivitas koordinasi dapat mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan ketepatan sasaran program, dan mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih kegiatan. Dengan demikian, pemerintah desa berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kondisi konkret masyarakat.

Meskipun demikian, koordinasi kelembagaan dalam kondisi pandemi juga menghadapi potensi persoalan berupa ketergantungan pada komunikasi informal dan instruksi vertikal. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif perlu didukung oleh mekanisme komunikasi yang jelas, pembagian tugas, pencatatan kegiatan, serta evaluasi bersama. Hal tersebut penting agar koordinasi tidak hanya berjalan ketika terjadi persoalan, tetapi menjadi sistem yang dapat digunakan dalam menghadapi situasi krisis berikutnya.

4.3. Implementasi Program Penanggulangan COVID-19

Implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat diwujudkan melalui beberapa program, antara lain sosialisasi protokol kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat, dan pengelolaan bantuan sosial. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah direncanakan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Sosialisasi protokol kesehatan menjadi salah satu instrumen penting karena keberhasilan pengendalian pandemi sangat bergantung pada perilaku masyarakat. Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi karena memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui pemerintah desa dan tokoh masyarakat cenderung lebih mudah diterima karena menggunakan saluran komunikasi yang telah dikenal oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya menghasilkan output berupa kegiatan sosialisasi, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perubahan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan Sari dan Wibowo (2020) yang menunjukkan bahwa edukasi kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Edukasi menjadi penting karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada dasarnya dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai risiko dan manfaat tindakan pencegahan.

Namun, peningkatan kesadaran tidak dapat dipandang sebagai indikator tunggal keberhasilan

implementasi. Keberhasilan implementasi juga perlu dilihat dari konsistensi penerapan kebijakan, cakupan masyarakat yang memperoleh informasi, ketepatan penerima bantuan sosial, serta kemampuan pemerintah desa mempertahankan pelaksanaan program selama pandemi berlangsung.

Dengan demikian, implementasi program di Desa Sugih Waras Barat dapat dikategorikan cukup baik, tetapi masih perlu dilihat secara lebih mendalam dari sisi outcome. Hal ini penting karena keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut menghasilkan perubahan yang diharapkan.

4.4. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan

Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam tata kelola penanggulangan COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa melakukan monitoring terhadap kegiatan masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan pandemi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Monitoring menjadi penting karena kebijakan pandemi bersifat dinamis. Kondisi masyarakat, tingkat risiko penyebaran, dan kebijakan pemerintah dapat mengalami perubahan dalam waktu relatif cepat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi dari lapangan dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam menentukan tindakan selanjutnya.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah desa juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan. Keberadaan monitoring menciptakan mekanisme kontrol sosial dan administratif sehingga masyarakat memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mengikuti protokol kesehatan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Temuan tersebut mendukung pandangan OECD (2020) bahwa pengawasan dan evaluasi merupakan komponen penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pada kondisi krisis kesehatan. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan.

Dalam konteks Desa Sugih Waras Barat, pengawasan dapat dipandang sebagai mekanisme feedback dalam tata kelola desa. Hasil monitoring memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaksanaan program, kemudian informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki strategi penanggulangan pandemi.

Akan tetapi, pengawasan yang efektif seharusnya tidak berhenti pada pemantauan kepatuhan masyarakat. Evaluasi juga perlu mencakup efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan penerima bantuan, kualitas koordinasi kelembagaan, serta dampak kebijakan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, evaluasi akan menghasilkan informasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah desa.

4.5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam tata kelola penanggulangan COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan. Tingkat partisipasi yang cukup baik menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya berada pada posisi sebagai objek kebijakan, tetapi turut menjadi bagian dari

proses penanggulangan pandemi.

Partisipasi masyarakat dalam kondisi pandemi memiliki karakter yang berbeda dibandingkan partisipasi dalam pembangunan desa pada kondisi normal. Pada masa pandemi, partisipasi dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan, penyebaran informasi yang benar, keterlibatan dalam kegiatan pencegahan, serta dukungan terhadap program pemerintah desa.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena pemerintah desa memiliki keterbatasan sumber daya. Keberhasilan penanggulangan pandemi pada akhirnya sangat bergantung pada perilaku masyarakat. Kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan outcome yang optimal apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran dan kemauan untuk menjalankannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan UNDP (2022) yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan dalam menghadapi pandemi. Partisipasi dapat meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Meskipun demikian, partisipasi perlu dibedakan antara partisipasi yang bersifat pasif dan partisipasi yang bersifat substantif. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan bentuk partisipasi dalam implementasi kebijakan, tetapi belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang lebih substantif terjadi apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, ikut menentukan prioritas program, serta terlibat dalam evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sugih Waras Barat dapat dinilai cukup baik pada tahap implementasi, khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Namun, ruang partisipasi pada tahap perencanaan dan evaluasi perlu terus diperkuat agar tata kelola desa menjadi lebih inklusif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Desa Sugih Waras Barat dalam penanggulangan COVID-19 berjalan melalui lima komponen utama, yaitu perencanaan kebijakan, koordinasi kelembagaan, implementasi program, pengawasan dan evaluasi, serta partisipasi masyarakat. Kelima komponen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dalam membentuk proses tata kelola pandemi di tingkat desa.

Perencanaan melalui musyawarah memberikan dasar legitimasi bagi kebijakan yang dilaksanakan. Koordinasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan aparat keamanan memungkinkan pembagian peran dalam penanganan pandemi. Selanjutnya, implementasi program menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan konkret berupa sosialisasi, pembatasan kegiatan masyarakat, dan bantuan sosial. Pengawasan dan evaluasi memberikan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan program, sedangkan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sugih Waras Barat telah menjalankan fungsi tata kelola yang relatif adaptif dalam menghadapi situasi krisis. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai koordinator berbagai aktor lokal dan fasilitator keterlibatan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat ruang penguatan pada aspek partisipasi substantif, evaluasi berbasis outcome, transparansi pengelolaan sumber daya, dan pelembagaan mekanisme koordinasi. Hal ini penting karena kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas proses pengambilan keputusan dan dampak program terhadap masyarakat.

Dengan demikian, penanggulangan COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat dapat dipahami sebagai proses tata kelola kolaboratif pada tingkat lokal. Pemerintah desa menjadi aktor utama, tetapi efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan puskesmas, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Semakin kuat koordinasi, partisipasi, transparansi, dan kemampuan adaptasi pemerintah desa, semakin besar pula peluang terciptanya kebijakan penanggulangan krisis yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Tata kelola pemerintahan desa di Desa Sugih Waras Barat Kabupaten Muara Enim dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 telah berjalan secara cukup efektif melalui perencanaan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat, koordinasi kelembagaan, implementasi program kesehatan, serta pengawasan kebijakan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanggulangan pandemi. Namun, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung masih menjadi tantangan dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2020). Pengawasan dana desa untuk penanganan COVID-19. Jakarta: BPKP.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Penanganan pandemi nasional. Jakarta: BAPPENAS.
3. Creswell, J. W., Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
4. Halim, A. (2021). Public sector governance. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Panduan desa tanggap COVID-19. Jakarta: Kemendes PDTT.
6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Kebijakan penanganan COVID-19 di desa. Jakarta: Kemendagri.
7. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). Tata kelola pemerintahan desa. Jakarta: LAN RI.
8. Lincoln, Y. S., Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
9. Mahmudi. (2020). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

10. Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: ANDI.
11. Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
12. Nasution, A. (2020). *Public accountability*. Jakarta: Prenadamedia Group.
13. Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and practice* (9th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
14. Nugroho, R., Kurniawan, T., Pratama, A. (2021). Village governance during pandemic. *Journal of Public Governance*, 15(2), 45–58.
15. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Governance responses to COVID-19*. Paris: OECD Publishing.
16. Prasajo, E. (2017). *Governance reform and public administration*. Jakarta: Rajawali Press.
17. Rahman, A., Putra, H. (2022). Collaborative governance in pandemic management. *Journal of Public Policy and Governance*, 6(1), 30–44.
18. Rhodes, R. A. W. (2017). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. London: Open University Press.
19. Robbins, S. P., Judge, T. A. (2021). *Organizational behavior* (18th ed.). Harlow, UK: Pearson Education Limited.
20. Sari, D., Wibowo, A. (2020). Community participation in pandemic response. *Journal of Community Governance*, 8(1), 25–38.
21. Setyawan, B. (2023). *Public governance strategy*. Jakarta: Prenadamedia Group.
22. Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
23. Sutaryo, D. (2022). *Public policy implementation*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
24. United Nations Development Programme. (2022). *COVID-19 governance report*. New York, NY: UNDP.
25. Widodo, J. (2019). *Analisis kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative.
26. World Bank. (2021). *Local governance during pandemic*. Washington, DC: World Bank Publication